

BAB V
PERGANTIAN TAHTA
DAN SULTAN HB VII WAFAT

Tahun 1920 merupakan akhir dari masa pemerintahan Sultan HB VII. Meskipun tidak terjadi ketegangan politik yang mencolok, situasi di lingkungan kraton Yogyakarta masih menunjukkan ada potensi konflik di kalangan elit penguasa. Ada dua faktor yang mendominasi situasi politik dan menentukan terjadinya perubahan. Faktor pertama adalah kondisi kesehatan Sultan HB VII yang terus merosot – yang bisa mengundang spekulasi di kalangan elit kraton tentang kemungkinan pergantian penguasa. Faktor kedua, masih ada fraksionalisasi politik, terutama di antara kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk menggantikan Sultan HB VII. Kelompok-kelompok ini berpusat pada beberapa sosok penting dalam birokrasi Kesultanan Yogyakarta dan masih memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan raja. Sampai akhir pemerintahan Sultan HB VII, suasana tersebut tetap berlangsung yang berakhir dengan pergantian raja pada awal tahun 1921.

5.1 Putra-Putra Sultan HB VII dan Pergerakan Politik

Setelah kepergian putra mahkota Pangeran Adipati Puruboyo ke Belanda, suasana di Kraton Yogya belum sepenuhnya tenang. Permaisuri Sultan, Ratu Kencono, tetap mengupayakan agar putranya, Pangeran Adipati Mangkukusumo, mendapatkan posisi yang penting di kraton. Upaya meraih posisi tinggi ini dilakukan sebagai penyembuh luka bagi dirinya yang gagal memperjuangkan putranya menjadi pewaris tahta. Sementara itu saudara-saudara pangeran ini, yaitu Pangeran Tejokusumo dan Pangeran Suryodiningrat, cenderung menarik diri dari kraton dan menyibukkan diri dengan aktivitas seni.

Sultan HB VII memberikan perhatian yang besar pada kegiatan kesenian yang dirintis oleh kedua putranya tersebut. Dengan mendirikan sekolah tari gaya Yogyakarta yang pertama kali dibuka untuk umum, Krido Bekso Wiromo, kedua pangeran ini berhasil memperkenalkan kebudayaan kraton yang semula hanya terbatas di lingkup istana, menjadi meluas dan hidup di kalangan masyarakat.

Mereka yang berminat untuk mempelajari tari gaya Yogyakarta bisa datang dan mendaftarkan ke *Dalem* Tejakusuman. Selain itu, pentas tari dan wayang orang menjadi semakin marak sejak akhir tahun 1918, dan mendapatkan dukungan penuh dari Sultan HB VII.

Hal tersebut menjadi fenomena yang menarik. Namun fenomena yang lebih penting dari hal itu adalah hubungan yang terjadi antara para bangsawan kraton, terutama para putra Sultan HB VII, dengan para aktivis organisasi politik di luar kraton. Salah satu organisasi yang bersentuhan dengan para bangsawan Yogya ini adalah Budi Utomo. Sultan HB VII menunjukkan sikap simpatinya kepada Budi Utomo pada tahun 1909, yaitu ketika ia mengizinkan penyelenggaraan kongres pertama Budi Utomo di *Mataram Loge*, Jalan Malioboro.²³⁰ Bangunan milik Sultan ini merupakan gedung pertemuan milik kelompok *Vrijmetselaar* (*Freemason*) yang tumbuh dan berkembang di Yogya pada akhir abad XIX. Beberapa orang bangsawan Jawa menjadi anggota dari organisasi ini, seperti Pangeran Notodirojo.²³¹ Melalui para bangsawan ini, Budi Utomo mampu memperkenalkan programnya kepada Sultan HB VII.

Organisasi massa lainnya yang bersentuhan dengan kalangan kraton adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh penghulu kraton, KH Achmad Dahlan. Dasar organisasi ini adalah melaksanakan ajaran agama Islam secara murni dengan tujuan mengentaskan umat Islam dari kebodohan dan keterbelakangan. Dengan arah perjuangan seperti itu, Achmad Dahlan menggariskan, bahwa perlu diambil upaya pembelajaran kepada umat Islam seluas-luasnya dengan menerapkan model pendidikan Barat, namun tetap berazaskan pada landasan Islam - sehingga umat Islam akan mampu menghadapi perubahan zaman. Berpusat di Kampung Kauman, sebagai lokasi tempat tinggal penghulu kraton, organisasi ini tumbuh di sekitar tempat kemunculannya. Namun karena misinya adalah mendidik umat Islam untuk kembali kepada kemurnian ajaran Islam, sementara keyakinan sinkretisme yang dianut di kalangan para bangsawan masih kuat melekat, maka Muhammadiyah

²³⁰G.J. Resink, "Boedi Oetomo in Vorstenlandse Omgeving", dalam *BKI*, tahun 1976, halaman 465.

²³¹*Mataram Loge* didirikan pada tahun 1882 melalui dana yang dikumpulkan dari para pengikut *Vrijmetselaar*, yang umumnya terdiri atas para pengusaha gula sebagai para penyewa tanah di Kesultanan Yogyakarta. Lihat Ulbe Bosma and Remco Raben, 2008, *op.cit.*, halaman 138.

pada masa awal belum mampu menanamkan pengaruh yang besar di lingkungan kraton. Selain itu, tindakan pemerintah kolonial yang selalu menunda pemberian pengakuan resmi kepada Muhammadiyah, tampaknya menghambat langkah para pengurus pertamanya dalam memperluas pengaruh Muhammadiyah di lingkungan kraton. Sementara KH Achmad Dahlan lebih banyak mencurahkan aktivitasnya pada organisasi Muhammadiyah daripada tugasnya sebagai penghulu kraton.²³²

Dari sejumlah organisasi massa di luar lingkungan kraton, belum ada satupun yang mampu menanamkan pengaruhnya di kalangan para bangsawan. Namun justru sebaliknya dari kalangan kraton, tampil sejumlah tokoh yang kemudian ikut berperan dalam pergerakan nasional. Kerabat Sultan HB VII, Pangeran Suryodiningrat selain berperan dalam menyebarluaskan kesenian gaya Yogyakarta, juga kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh dalam organisasi pergerakan. Posisinya sebagai Kepala Bagian Agraria Kesultanan Yogyakarta memungkinkannya untuk mengunjungi seluruh pelosok wilayah Kesultanan Yogyakarta dan dapat berhubungan dengan masyarakat luas. Hubungan ini, kelak kemudian dimanfaatkan olehnya untuk membentuk sebuah organisasi massa Pakempalan Kawula Ngayogyakarta (PKN) , pada tahun 1930.²³³

Sementara itu, Pangeran Tejokusumo yang merupakan salah satu adik dari Pangeran Mangkukusumo lebih banyak mencurahkan diri pada aktivitas di bidang seni dan kebudayaan Jawa. Keberhasilannya dalam membuka sekolah tari Krido Bekso Wiromo di luar kraton dan kepopuleran gaya tari Yogyakarta di kalangan masyarakat luas, menjadikan sosok pangeran ini sangat dikenal sebagai salah seorang budayawan Jawa - dan semakin menjauhkannya dari kehidupan politik kraton.²³⁴

Pangeran Mangkukusumo juga semakin menurun semangatnya dalam menuntut untuk menjadi pewaris tahta. Apalagi dengan melihat kondisi fisik

²³² Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen-Islam di Indonesia* (Jakarta, 2005, BPK. Gunung Mulia), halaman 161. Pemerintah Hindia Belanda baru memberikan pengakuan pada tahun 1914 sejak pengurus pertama Muhammadiyah mengajukan permohonan tanggal 20 Desember 1912 bagi pengakuan badan hukum.

²³³ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta, 2008, Serambi), halaman 405.

²³⁴ Ted Solis, *Performing Ethnomusicology: teaching and representation in world music ensemble* (Berkeley, 2004, University of California Press.), halaman 54. Memasuki dekade 1930-an, Tejokusumo juga terlibat dalam dunia pergerakan. Pada bulan Januari 1933 rumahnya digunakan untuk rapat Parindra.

ibunya, Ratu Kencono, yang terus menurun, praktis keinginan dirinya menjadi calon pewaris tahta sudah pupus. Namun demikian, Sultan HB VII tetap memperhatikan nasib putranya ini dan memberikan kedudukan sebagai calon *pangageng* kraton, yaitu Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kesultanan Yogyakarta - dengan kewenangan mewakili Sultan dalam melakukan kunjungan ke daerah kekuasaannya. Mangkukusumo juga diberi mandat oleh Sultan untuk hadir dalam perundingan-perundingan penting dengan pemerintah kolonial ataupun dengan pihak kraton lain – seperti dengan Pakualaman, Kesunanan Surakarta dan Mangkunegaran.

Tetapi pada tahun 1920, terjadi suatu peristiwa penting yang menyangkut salah seorang putra Sultan HB VII dan berpengaruh pada kondisi fisik dan batin raja ini. Peristiwa itu adalah keterpaksaan untuk mencabut status kebangsawanan salah satu putranya, Pangeran Suryo Mataram. Meskipun pencabutan status kebangsawanan itu semata-mata justru untuk menyelamatkan nasib pangeran itu dari hukuman atas tuduhan merencanakan makar oleh pemerintah kolonial, namun kehidupan sebagai orang biasa pasti menyulitkan pangeran itu. Setelah kembali dari pembuangan, Suryo Mataram lebih banyak mencurahkan diri pada aktivitas kebatinan. Dalam hal ini, ia membuat suatu ajaran tentang kehidupan manusia dan menarik banyak pengikut, yang bersifat mobilisasi massa dalam kegiatannya. Ketika hal ini mulai menjadi perhatian pemerintah kolonial, Sultan HB VII memanggil Suryo Mataram pada awal bulan Juli 1920. Dalam pembicaraan dengan Sultan, Suryo Mataram mengakui bahwa dirinya bermaksud untuk menjadi seorang ahli kebatinan dengan alirannya sendiri dan bergelar Ki Ageng Suryo Mataram.²³⁵

Selama itu, tempat tinggal Pangeran Suryo Mataram di dalam kompleks lingkungan kraton telah dijadikan sebagai pusat kegiatan berkumpul massa pengikut, dalam rangka mengajarkan ilmu kebatinan. Karena statusnya sebagai seorang bangsawan tidak memungkinkannya untuk melaksanakan hal tersebut dan untuk menghindari dari penangkapan serta penahanan oleh pemerintah kolonial, Sultan HB VII memerintahkan putranya agar menghentikan kegiatan tersebut. Namun Suryo Mataram menolak dan menghendaki bahwa lebih baik statusnya

²³⁵ ANRI, *Agenda 5 Juli 1920 no. 73*, bundel *Algemeen Secretarie*.

sebagai pangeran dicabut, sehingga ia tetap bisa menjalankan kegiatan tersebut. Suryo Mataram hanya meminta diperkenankan tetap tinggal di tempat yang sekarang dihuninya - karena sudah berfungsi sebagai *Padepokan* Suryo Mataraman. Sultan HB VII tidak bisa memutuskan hal tersebut, karena berpikir tentang dampaknya pada kerabat kraton yang lain.²³⁶

Dengan mempertimbangkan situasi kehidupan politik di kraton yang mulai tenang, ditambah dengan kondisi fisik yang semakin menurun karena usianya yang sudah mencapai 81 tahun, Sultan HB VII sejak pertengahan tahun 1920, mulai mengurangi kegiatan dalam pemerintahannya. Bahkan Sultan menyampaikan keinginan untuk turun dari tahta kepada Patih Danurejo VII – dan juga disampaikan kepada Sunan PB X yang melakukan kunjungan sebagai menantu di *Pesanggrahan* Ambarukmo pada awal bulan Maret 1920.²³⁷ Salah satu motivasi yang mendorong keinginan itu adalah bahwa status putra mahkota telah jelas – dan telah diterima dengan baik oleh kerabat raja, maupun pemerintah kolonial. Di samping itu, Sultan ingin memberikan kesempatan kepada generasi muda, yang lebih tepat untuk menyongsong pembaruan-pembaruan dalam administrasi birokrasi – sehingga pemerintahan kraton akan berjalan semakin baik.

Sementara itu, Sultan HB VII juga merasa ruang geraknya sebagai raja sangat sempit sebagai akibat pembatasan-pembatasan kewenangan oleh pemerintah kolonial yang semakin berat. Sejumlah kebijakan pemerintah kolonial banyak merugikan posisinya sebagai penguasa Yogyakarta - seperti yang dialaminya dalam program reorganisasi agrarian yang dipaksakan pemerintah Belanda. Salah satu program reorganisasi ini adalah penghapusan sistem apanage yang mengembalikan semua tanah menjadi milik raja. Meskipun menurut peraturan tersebut, raja kembali menjadi penguasa mutlak atas kepemilikan semua tanah yang ada di wilayahnya, namun pengelolaan dan eksploitasi tanah-

²³⁶ ANRI, *Agenda 3 Agustus 1921*, bundel *Algemeen Secretarie*. Sampai pergantian tahta di Kesultanan Yogyakarta, status Pangeran Suryo Mataram tetap belum bisa diputuskan.

²³⁷ ANRI, *Agenda 4 Maret 1920 no. 9216*, bundel *Algemeen Secretarie*. Susuhunan diberi izin oleh pemerintah kolonial untuk mengunjungi Yogyakarta dengan alasan menjenguk mertuanya yang sedang sakit. Ia diberi waktu antara tanggal 6 dan 8 Maret 1920. Dalam pembicaraan itu, Sultan menyampaikan keinginan untuk turun tahta dan mengasingkan diri untuk menjadi seorang pertapa (*madeg pandhita*).

tanah tersebut selanjutnya tidak begitu saja bisa dinikmati hasilnya. Hasil produksi tanah ini harus disetorkan ke sebuah kas yang akan dibentuk dengan istilah kas daerah (*landschapkas*). Kas ini dikelola oleh patih di bawah pengawasan residen. Kas daerah akan menampung semua hasil penjualan produk agraria dari seluruh Kesultanan Yogyakarta dan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran kraton. Sultan tidak diperkenankan menggunakan langsung uang itu tanpa persetujuan residen. Dengan demikian kewenangan Sultan atas kekayaannya merosot tajam.²³⁸ Hal ini membuat Sultan HB VII tidak sepenuhnya mendukung kebijakan reorganisasi agraria.

5.2 Pengangkatan Sultan HB VIII

Pemerintah kolonial Belanda juga menyadari situasi yang terjadi di Kesultanan Yogyakarta itu. Mereka menganggap, Sultan HB VII sudah terlalu tua untuk memerintah kerajaannya dengan baik. Dan hal utama yang membuat pemerintah kolonial di Batavia menjadi gerah adalah sikap Sultan HB VII yang kurang menunjukkan kerjasama dalam program reorganisasi agraria yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial di tanah-tanah Kesultanan Yogyakarta. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah menurunkan Sultan HB VII dan menggantinya dengan putra mahkota, Pangeran Puruboyo - yang saat itu masih berada di Belanda.

Pada akhir Agustus 1920, ide untuk melakukan penggantian raja di Kesultanan Yogyakarta mulai banyak dibicarakan oleh para pejabat tinggi Belanda di Batavia. Residen Jonquiere yang menjadi wakil pemerintah di Yogyakarta sangat berperan dalam hal ini. Ia mengusulkan kepada Gubernur Jenderal van Limburg Stirum agar upaya pergantian tahta tersebut dipercepat.²³⁹ Alasan Jonquiere adalah bahwa Sultan HB VII tidak lagi mampu secara fisik memerintah kerajaannya dan berhubungan dengan pemerintah Belanda.

²³⁸ ANRI, *Telegram Gouvernement Secretaris 4 Desember 1920 no. 2277*, bundel *Algemeen Secretarie*. Sultan sendiri pernah meminjam uang secara pribadi kepada NHM sebesar f 30 ribu dengan keterangan untuk memperbaiki kondisi keuangan kraton. Apakah ini disebabkan oleh buruknya kas daerah atau atas inisiatif pribadi Sultan, pada prinsipnya kenyataan ini menunjukkan bahwa reorganisasi agraria berdampak negatif pada keuangan Sultan.

²³⁹ ANRI, *Agenda 27 Agustus 1920 no. 1044*, bundel *Algemeen Secretarie*.

Tetapi persoalannya adalah bahwa hal tersebut tidak akan bisa dilaksanakan, bila putra mahkota tidak berada di Yogyakarta. Sementara itu, Puruboyo masih berada di Belanda, dan pemanggilannya kembali hanya bisa dilakukan oleh Sultan HB VII. Oleh karena itu, van Limburg Stirum menyuruh Jonquiere untuk mendesak Sultan HB VII agar bersedia memanggil kembali Puruboyo dari Belanda ke Yogyakarta. Residen menekankan, bahwa pemanggilan putra mahkota dengan alasan untuk persiapan acara pelantikan menjadi calon raja (*Pangeran Adipati Aryo Hamangkunagoro Sudibyo Rojoputro Narendro ing Mataram*). Jonquiere melaksanakan instruksi itu dan menemui Sultan dalam beberapa kesempatan. Akhirnya Sultan HB VII setuju memanggil putranya melalui berita telegram pada awal November 1920.²⁴⁰

*Kang binudi-budi pinrih dadi
Ing wak kula mengko
Ironing sasi Mulud tahun kiye
1851, lan Nopember warsi
Maksih ongko sewu 920 lumaris
Serat kabar criyos
Ing sarehne wus lami linggare
Saking nagri Ngayogya kinapti
Ing rama jeng mulki, Sri HB ping VII
Kinon kondur away lami-lami
Neng Eropa manggon
Selak saya dahat wulangune
Putri Santana myang bretya pati
Ngayun-nayun sami
Tumuliya kundur²⁴¹*

Yang dipuji-puji agar sukses olehku kelak di kemudian hari selama bulan Mulud tahun 1851 bulan November tahun 1920 masih berjalan surat kabar memberitakan bahwa karena sudah lama pergi dari negeri Yogyakarta selama ini ayahanda Sultan HB VII meminta pulang jangan terlalu lama tinggal di Eropa sebab semakin terasa rindunya para putri kerabat dan abdi raja semuanya menantikan kepulangannya

Dari kutipan di atas bisa diketahui bahwa permohonan pulang berasal dari Sultan HB VII. Tidak ada kejelasan, apakah Sultan HB VII ditekan oleh Belanda atau tidak, namun kedatangan Puruboyo bukan hanya dinantikan oleh ayahnya, tetapi juga oleh para kerabat dan abdi kraton. Dalam hal kepulangan putra mahkota itu, Jonquiere menerima instruksi dari pemerintah pusat di Batavia, agar Pangeran Puruboyo tidak langsung kembali ke kraton - melainkan harus singgah terlebih

²⁴⁰ *Serat Sapta Asta, pupuh 1 padha 4-6*. Kutipan dibuat dalam bahasa Jawa, kemudian diterjemahkan oleh penerjemah kraton, Winter, ke dalam bahasa Belanda, dan diberikan kepada Resdien Jonquiere.

²⁴¹ *Serat Sapta Asta, pupuh 1 padha 4-6*.

dahulu di rumah dinas residen. Alasannya, adalah untuk mengadakan persiapan bagi tatacara pelantikan tahta dan penandatanganan *Akta van Verband*.

Pada akhir Desember 1920, jawaban dari Puruboyo tiba, namun tidak langsung diterima oleh Sultan HB VII. Telegram diterima oleh pemerintah kolonial di Batavia yang diserahkan kepada Jonquiere. Melalui Residen Yogyakarta tersebut, telegram balasan diserahkan kepada Sultan HB VII. Dalam telegram tersebut dikatakan, bahwa Puruboyo bersedia kembali ke Kesultanan Yogyakarta, apabila ia langsung didudukkan di tahta. Dengan demikian, terkesan Puruboyo menghendaki agar Sultan HB VII turun tahta dan menyerahkan tampuk kekuasaan kepadanya.

<i>Angaturi wangsulan tinulis</i>	memberikan jawaban tertulis
<i>Neng telegram kacaosaken</i>	lewat telegram diserahkan
<i>Dening jeng Tuwan Residen</i>	oleh Tuan Residen
<i>Pewe Sonkir malebet mring puri</i>	P.W. Jonquiere masuk ke kraton
<i>Samana wus panggih</i>	saat itu sudah bertemu
<i>Lan Kanjeng Sang Prabu</i>	dengan sang raja
<i>Alon matur nyaosi udani</i>	berbicara pelan menyampaikan pesan
<i>Tilgram kang suraos</i>	telegram yang isinya
<i>Karsa kondur nanging panuwune</i>	bersedia pulang tetapi meminta
<i>Sadurunge rawuh ing negari</i>	sebelum tiba di negeri
<i>Ngayogya sang Pekik</i>	Yogyakarta, sang putra
<i>Kanjeng Sang Prabu</i>	sang raja sebaiknya
<i>Den aturi jengkara rumiyin</i>	meninggalkan kraton terlebih dahulu
<i>Saking jro kadhaton</i>	dari dalam kedaton (tempat tinggal raja)
<i>Lan karsa akaprabon sumereh</i>	dan bersedia menyerahkan kekuasaan
<i>Mring Jeng Gusti kang gumanti aji</i>	kepada putranya yang menggantikannya
<i>Lamun wus nglilani</i>	bila sudah berkenan
<i>Makaten gya kundur.</i> ²⁴²	Maka dia akan segera pulang

Kata-kata di atas menunjukkan ada keinginan Puruboyo untuk segera kembali dan menduduki tahta. Jika melihat status Puruboyo sebagai putra mahkota dan dikaitkan dengan perkembangan sejarah para putra mahkota sebelumnya - yang sering berakhir dengan bencana - ada kemungkinan permintaan Puruboyo ini lebih bersifat jaminan bagi keselamatannya. Puruboyo bukannya tidak mengetahui bahwa masih ada kelompok di kalangan kerabat kraton yang tidak menghendaki dirinya sebagai calon pewaris tahta, dan kelompok itu kemungkinan masih

²⁴²*Serat Sapta Asta, pupuh 2 pada 9-11*

memiliki keinginan untuk mengambil alih kekuasaan - setelah Sultan HB VII turun tahta.

Namun demikian ada sesuatu yang menarik dalam hal ini, bahwa jawaban itu disampaikan lewat Jonquiere. Dalam keterangan tersebut, tidak ada kejelasan apakah Jonquiere sendiri menunjukkan isi telegram itu kepada Sultan HB VII. Jika Puruboyo menginginkan kembali, ia bisa langsung menyampaikannya kepada Sultan HB VII seperti pada saat keberangkatannya. Melapor kepada residen memang menjadi kewajiban dari para bangsawan Jawa, termasuk raja apabila ingin meninggalkan wilayahnya. Tetapi tidak ada peraturan dari pemerintah kolonial, bila seorang putra raja ingin mengirimkan surat atau telegram kepada raja harus dilakukan lewat residen.

Hal yang menarik lainnya adalah hubungan Puruboyo dan Sultan HB VII. Sebelum berangkat ke Belanda, hubungan tersebut sangat dekat. Tanpa ada keraguan sedikitpun Puruboyo sudah pasti dipilih oleh ayahnya untuk menjadi pengganti, bahkan setelah terjadi kasus tuduhan pencurian uang, kepercayaan Sultan HB VII kepada Puruboyo semakin meningkat. Kepergian Puruboyo keluar negeri juga atas perkenan Sultan HB VII dengan tujuan menambah wawasan. Dari kalimat yang tertera pada kutipan di atas juga tampak bagaimana Sultan HB VII sangat mengharapkan kedatangan kembali Puruboyo dan bisa menjadi penggantinya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Puruboyo untuk mengajukan tuntutan penyerahan tahta segera, apalagi mengusir ayahnya dari kraton - seolah-olah Puruboyo khawatir tidak akan menerima warisan kekuasaan.

Meskipun demikian, ada dua hal dari karya tersebut yang bisa dicermati. Pertama, ada sesuatu yang direncanakan oleh Jonquiere dan pemerintah Hindia Belanda sehubungan dengan penurunan tahta Sultan HB VII dan penggantinya dengan Puruboyo. Jika hal ini benar, kepentingan yang ada di belakang itu adalah agar pemerintah kolonial bisa mewujudkan sasarannya yang belum tercapai di Kesultanan Yogyakarta, khususnya yang berhubungan dengan reorganisasi agraria. Kondisi ini diperkuat dengan adanya rencana *Verklaring* dan *Akta van Verband* yang telah disusun oleh Direktur Pemeritahan Dalam Negeri (*Binnenlandsch Bestuur*) dan diserahkan kepada Gubernur Jenderal van Limburg Stirum - yang tembusannya dikirimkan kepada Jonquiere. Berkas sangat rahasia

ini telah diterima oleh Jonquiere pada awal Desember 1920, dan setelah itu Jonquiere menyerahkan telegram Puruboyo kepada Sultan HB VII.²⁴³

Kedua, *Serat Sapta Asta* merupakan sebuah karya yang disusun oleh seorang pujangga yang tidak diketahui namanya. Melihat isi dari *serat* tersebut, bisa diduga bahwa pembuatan ini berasal dari periode setelah Sultan HB VII wafat. Kalimat yang digunakan dalam karya tersebut menunjukkan adanya tuduhan secara halus terhadap Puruboyo yang dianggap melakukan kudeta atas tahta ayahnya. Dengan demikian *serat* ini disusun oleh mereka yang mendukung Sultan HB VII dan menyalahkan Sultan HB VIII sebagai seorang putra yang telah berani menentang orangtuanya. Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika muncul tuntutan tentang keabsahan status Sultan HB VIII sebagai raja, karena ia naik tahta sementara Sultan HB VII masih hidup. Tetapi pada bagian lain, konteks tersebut berbeda dan akan dibahas pada bagian selanjutnya di sini.

Setelah menerima berita tentang keinginan kembali Puruboyo melalui Jonquiere, maka Sultan HB VII bersedia turun tahta dan menyerahkan kepada putranya. Nakun untuk hal tersebut, Sultan HB VII meminta waktu selama beberapa minggu untuk mempertimbangkan hal itu. Pada akhir Desember 1920, Sultan HB VII memberikan jawaban kepada Jonquiere tentang kesediaannya untuk memenuhi keinginan tersebut, yaitu turun tahta – dan kemudian membuat surat permohonan pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Tetapi Sultan HB VII juga menyampaikan bahwa setelah dirinya tidak lagi berkuasa, ia memilih tinggal di luar kraton. Tempat yang dipilih menjadi kediamannya adalah Pesanggrahan Ambarukmo yang telah dibangun olehnya.²⁴⁴

²⁴³ ANRI, *Agenda 2 Desember 1920 no. 1406*, bundel *Algemeen Secretarie*. Berkas *Verklaring dan Akta van Verband* telah disusun sejak bulan Agustus 1920 dan mengalami beberapa kali perubahan hingga awal Desember 1920.

²⁴⁴ ANRI, *Agenda 30 Desember 1920 nomor 1511*, bundel *Algemeen Secretarie*. *Pesanggrahan* Ambarukmo dibangun oleh Sultan HB V sebagai tempat peristirahatan raja ketika raja datang untuk berburu di hutan sekitarnya. Pada masa pemerintahan Sultan HB VII *pesanggrahan* ini diperbaiki dan diperluas. Fungsinya juga berubah bukan lagi menjadi tempat istirahat saat berburu, tetapi digunakan untuk menyambut tamu-tamu raja khususnya dari Kesunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Hal itu dilakukan oleh Sunan HB VII mengingat pertemuan antara dirinya dari kerabat dari Kesunanan atau Mangkunegaran wajib melalui upacara protokoler dan harus seizin residen jika akan dilaksanakan di kraton. Sebaliknya di *pesanggrahan*, Sultan HB VII bisa dengan bebas menerima tamu-tamunya khususnya setelah kedua raja di Surakarta itu menjadi menantunya.

Sultan HB VII mengajukan pengunduran dirinya kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda J.P.G. van Limburg Stirum jauh hari sebelum pemanggilan Puruboyo dari Negeri Belanda, yaitu melalui sebuah surat yang bertanggal 13 Sapar Tahun Alip 1851, atau tanggal 27 Oktober 1920. Dalam surat permohonan pengunduran diri itu disebutkan, bahwa Sultan HB VII merasa sudah sangat tua, dan maksud pengunduran dirinya adalah memberi kesempatan kepada penerusnya yang muda untuk memerintah Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian, pemerintah kolonial sudah sangat yakin, bahwa pergantian tahta bisa berjalan lancar. Melalui surat bertanggal 5 Jumadil Awal Tahun Alip 1851 atau 15 Januari 1921, Gubernur Jendral van Limburg Stirum membalas surat permohonan pengunduran sultan. Surat yang dibacakan oleh Residen Jonquiere di hadapan Sultan HB VII dan para *sentana dalem*, pada tanggal 21 Januari 1921, pada dasarnya mengabulkan permohonan itu.²⁴⁵

Delapan hari setelah pemberitahuan tersebut, pada tanggal 29 Januari 1921, Sultan HB VII untuk yang terakhir kalinya mengadakan pertemuan resmi dengan para pejabat (*nararya*) dan kerabat tinggi (*sentana*) di Bangsal Kencono, Kraton Yogyakarta. Dalam pertemuan yang dimulai pada pukul sembilan pagi ini, Sultan HB VII mengungkapkan bahwa dirinya hari itu akan meninggalkan kraton dan menyerahkan pemerintahannya sementara kepada residen.²⁴⁶ Sultan HB VII juga sudah pasti untuk tinggal di Pesanggrahan Ambarukmo, setelah lengser sebagai raja. Selain permaisuri, Ratu Kencono, di antara para kerabat raja yang memilih ikut Sultan HB VII tinggal di Ambarukmo, terdapat dua orang pangeran, yaitu Pangeran Subronto dan Pangeran Ario Suryo Subanto.

²⁴⁵ *Het aftreden van den Sultan*”, dalam *Mataram*, Sabtu tanggal 22 Januari 1921. Gubernur Jenderal van Limburg Stirum memberikan jawaban yang sangat diplomatis dan isinya terkesan sangat menghormati pribadi Sultan HB VII. Kemungkinan pengunduran diri Sultan HB VII ini, karena sudah dilakukan pendekatan sebelumnya oleh Residen Jonquiere, maka surat persetujuan Gubernur Jenderal di Batavia hanya bersifat formalitas semata. Pemerintah kolonial justru tinggal menunggu surat pengunduran resmi dari Sultan HB VII tersebut.

²⁴⁶ *De groote gebeurtenissen aan het Djokjasche hof*”, dalam *Mataram*, tanggal 29 Januari 1921, halaman 2. Pertemuan itu dihadiri PA Paku Alam, Pangeran Prangwedono dari Surakarta, pejabat militer dan utusan *Vorstenlanden Landbouw Vereeniging* cabang Yogyakarta. Dalam berita koran berbahasa Belanda itu juga dituliskan oleh penulisnya tentang karakter Sultan HB VII, bahwa “Suara Sultan yang keluar menunjukkan kepada kita bahwa dirinya adalah sosok yang keras, meskipun sudah mencapai usia tua.” Ketika itu, lima hari lagi, usia Sultan HB VII genap 82 tahun.

Setelah mengucapkan perpisahan dengan semua kerabat dan pejabat tinggi kraton, Sultan HB VII menaiki kereta kencana *Garuda Yaksa* bersama Ratu Kencono dan diikuti oleh sejumlah kerabat dekatnya menuju Ambarukmo. Residen Jonquiere juga mendampingi hingga setibanya di Ambarukmo.²⁴⁷

<i>Linaju caritanira</i>	Seterusnya kisah ini
<i>Ing Ngayogya kahanane den tulisi</i>	di Yogyakarta kondisi demikian
<i>Nalika ing dina Sabtu</i>	ketika pada hari Sabtu
<i>Tuwin Januari tanggal</i>	dan bulan Januari tanggal
<i>Kaping sangalikur warsa masehi</i>	29 masehi
<i>Sri pinaksa trus mituhu</i>	Sang raja tetap memperhatikan
<i>Anenggih ri punika</i>	bahwa sudah saatnya
<i>Sang Aprabu jeng Sultan kang kaping pitu</i>	sang raja Sultan VII
<i>Aseleh kaprabonira</i>	meletakkan kekuasaannya
<i>Rehne wus sepuh sang aji</i>	sebab sang raja sudah tua
<i>Ing wanci jam sanga enjang</i>	Pada pukul sembilan pagi
<i>Putra wadya Ngayogya wus sumiwi</i>	semua rakyat Yogya sudah kumpul
<i>Miwah para tuan sagung</i>	bersama para pejabat tinggi
<i>Pepak munggend jro pura</i>	lengkap di dalam istana
<i>Sami lenggah neng bangsal kencono kepung</i>	duduk di bangsal kencono
<i>Mangagem-agem sadaya</i>	memakai busana lengkap
<i>Yata wau jeng narpati</i> ²⁴⁸	seperti menghadap sang raja

Dalam kutipan ini, *serat* menyebutkan bahwa alasan Sultan HB VII turun tahta adalah sudah merasa tua, sementara di bagian sebelumnya dikatakan akibat tuntutan Puruboyo. Dengan demikian, ada ketidaksamaan tentang penyebab pergantian tahta itu. Akan tetapi kenyataan yang ada adalah bahwa Sultan HB VII meninggalkan istana sebelum Puruboyo tiba.

Puruboyo mendengar berita tentang kesediaan ayahnya menyerahkan tahta kepadanya sejak akhir Desember 1920, dan menyatakan dirinya siap untuk kembali ke Yogyakarta. Namun tidak ada keterangan dari Puruboyo, bahwa ia mengajukan permohonan agar ayahnya turun tahta. Bahkan dirinya merasa heran mengapa ada permintaan agar ia segera menggantikan ayahnya.

²⁴⁷ “*Het vertrek van den Sultan naar Ambarroekmoh*,“ dalam *Mataram*, Senin tanggal 31 Januari 1921. Keberangkatan Sultan HB VII menuju Pesanggrahan Ambarukmo ditandai dengan 19 tembakan meriam. Di sepanjang jalan, arak-arakan romobongan Sultan disambut oleh rakyat, dan jalanan dihiasi dengan bendera triwarna (bendera Belanda).

²⁴⁸ *Serat Sapta Asta*, pupuh 8-9.

*Mangkono ugo iku jeng gusti
Pangeran dipati anom
Dina iki Sabtu paing sore
Tanggal siji sasi Januwari
Ongko sewu tuwin
Sangang atus slikur
Pan kaplantrang-plantrang denya nulis
Bengkong menggak-menggok
Wosing crita banget pangungune
Dene jeng Gusti nyuwun supadi
Sageda tumuli gentosi sang prabu²⁴⁹*

Begitu juga Gusti
Pangeran Adipati Anom
Hari ini Sabtu pahing, sore
tanggal satu bulan Januari
tahun seribu
sembilan ratus dua puluh satu
terburu-buru menulis surat
tidak karuan, belok ke sana-kemari
prinsipnya merasa heran
mengapa Gusti memerintahkan
agar segera menggantikan sang raja

Istilah Gusti yang disebutkan pada dua kalimat terakhir dari kutipan di atas merujuk pada pemerintah kolonial Belanda. Dari situ jelas bisa diduga, bahwa pemerintah adalah pihak yang menghendaki pergantian tahta. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa peristiwa sebelum Sultan HB VII turun tahta, seperti telegram yang diserahkan oleh Jonquiere dan rancangan *Verklaring* dan *Akta van Verband* oleh Direktur Schippers yang telah disiapkan jauh sebelum Puruboyo kembali.

Kondisi itu semakin jelas ketika Puruboyo tiba di Batavia pada tanggal 6 Pebruari 1921 setelah turun dari kapal *Ludwig* (*anitih prahu kapal gedhe ingkang aran kapal yo andhuwig*). Dari pelabuhan Batavia, Puruboyo segera disambut oleh utusan pemerintah dan selanjutnya bersama Residen Batavia dan asisten residen Weltevreden, Puruboyo dibawa ke stasiun Kota SS (*Staatspoor*). Sebuah kereta Batavia Ekspres milik SS membawa Puruboyo menuju Yogyakarta. Pada sore hari pukul enam, Puruboyo tiba di Stasiun Tugu dan disambut oleh Asisten Residen Yogyakarta van Hegel, Pangeran Mangkunegoro, saudara-saudara pangeran dan utusan Kesunanan Surakarta.²⁵⁰ Perjalanan menuju rumah dinas residen Yogyakarta menggunakan kereta kuda, dan Puruboyo disambut Residen Jonquiere bersama para pejabat Belanda lainnya.²⁵¹

Setiba di rumah dinas residen, penyambutan dilakukan secara besar-besaran. Selain para pejabat Eropa, tampak hadir pula Pangeran Adipati

²⁴⁹ *Serat Sapta Asta pupuh 7.*

²⁵⁰ *De aankomst van den Kroonprins*, “ dalam *Mataram*, Senin tanggal 7 Februari 1921, lembar 2. Ketika kereta merapat dan gerbong itu berhenti di depan ruang penyambutan dan disongsong dengan musik yang memainkan lagu : ‘*Het wien Neerland’s bloed*’.

²⁵¹ “*Kroonprins*”, dalam koran *Sin Po*, tanggal 9 Pebruari 1921.

Prangwedono yang membawa serta korps Legiun Mangkunegaran, kapten Tionghoa Yogyakarta, pemimpin orang Arab dan para pejabat Eropa maupun pribumi. Hal ini menunjukkan seolah-olah Puruboyo sudah selayaknya seorang raja yang telah dilantik dan kembali dari suatu kunjungan perjalanan jauh. Di samping para penyambutnya, semua jalan dan bangunan yang dilewati oleh Puruboyo dari stasiun menuju rumah residen dan akhirnya ke kraton telah dihiasi dengan berbagai hiasan.

Di rumah dinas residen Yogya, kunjungan hanya berlangsung singkat. Selanjutnya Puruboyo menuju kraton, dan setelah berganti pakaian dari busana Barat ke busana Jawa, Puruboyo bersama Jonquiere berangkat disertai rombongan para pejabat pemerintah dan pribumi menuju Ambarukmo. Tujuan kedatangan mereka adalah mengunjungi ayahnya untuk memberitahukan tentang kedatangannya kembali serta meminta restu untuk pengangkatannya menjadi raja.²⁵²

Pada tanggal 8 Pebruari 1921, saatnya pelantikan Puruboyo menjadi Sultan HB VIII tiba. Pukul sembilan pagi upacara dilangsungkan yang dihadiri oleh semua pejabat Eropa dan pejabat Kesultanan Yogyakarta bersama seluruh kerabat dan tamu undangan. Dari Surakarta, Pangeran Adipati Prangwedono hadir dengan membawa korps musik Legiun Mangkunegaran untuk melantunkan lagi Wilhelmus sebagai tanda pembukaan acara tersebut. Puruboyo kemudian menandatangani *Verklaring* yang menyatakan, bahwa dirinya bersedia memenuhi semua permintaan pemerintah Hindia Belanda, sebagai syarat untuk dikukuhkan menjadi calon raja (*Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro*). Satu jam kemudian pelantikan menjadi Sultan Hamengku Buwono VIII berlangsung dengan ditandai penandatanganan *Akta van Verband*, sebagai tanda keterikatannya kepada pemerintah Hindia Belanda dan penganugerahan pangkat titular Jenderal Mayor dalam angkatan bersenjata kerajaan (KNIL). Setelah lantunan doa oleh

²⁵² “ *De aankomst van den Kroonprins*”, dalam *Mataram*, Senin, tanggal 7 Februari lembar 2. Kunjungan Puruboyo kepada ayahnya di Ambarukmo ini menunjukkan, bahwa hubungan antara ayah dan anak dalam hal ini tetap terjalin dengan baik. Hal ini menepis desas-desus sebelumnya, bahwa Puruboyo yang menghendaki agar ayahnya turun tahta. Puruboyo didampingi Residen Yogya datang di Ambarukmo pada petang hari. Sepanjang petang itu, jalan-jalan di Yogyakarta cukup ramai lalu-lintasnya, terutama di Jalan Malioboro yang tampak indah karena kanan-kirinya berhiaskan dedaunan dan bunga-bunga yang elok.

penghulu kraton dan penandatanganan oleh sejumlah saksi, termasuk *pangageng* kraton Pangeran Adipati Mangkukusumo, upacara berakhir pada pukul 12 siang dengan ditandai tiga belas ekali tembakan meriam dari Benteng *Vredeburg*.²⁵³

Pada sore harinya, sebelum acara *kirab* ²⁵⁴ - berkeliling kota untuk memperkenalkan diri kepada rakyat - dilaksanakan, Sultan HB VIII yang didampingi oleh Residen Jonquiere kembali mengunjungi Sultan HB VII di Ambarukmo. Kini setiba di Ambarukmo, Sultan HB VIII diperkenankan duduk sejajar dengan ayahnya dan mengambil tempat di sebelah kanan. Dalam pertemuan itu, Sultan HB VIII memberitahu ayahnya, bahwa kini dirinya telah menjadi raja yang sah dan diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Sultan HB VII diminta memberi restu. Dan setelah acara tersebut selesai, Sultan HB VIII berkenan kembali ke kraton.

Kunjungan Sultan HB VIII, baik sebagai Puruboyo maupun sebagai raja, kepada Sultan HB VII di Ambarukmo menandai bahwa antara keduanya tidak terdapat sikap saling permusuhan. Meskipun tidak dipahami oleh banyak orang, keduanya sadar bahwa peristiwa yang dialami mereka merupakan hasil dari rencana dan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Sultan HB VII tetap dianggap tidak mampu bekerjasama dengan pemerintah kolonial untuk menyelesaikan program reorganisasi agraria, dan harus diganti oleh orang lain. Dalam *Verklaring* yang ditandatangani oleh Sultan HB VIII, hal tersebut dinyatakan secara tegas tentang kesediaan raja untuk melaksanakan reorganisasi agraria.

5.3 Sultan HB VII Wafat

Meskipun tidak lagi menjabat sebagai raja, Sultan HB VII tetap diperkenankan menyandang gelar Sultan - meskipun sejak pelantikan Sultan HB

²⁵³ "*De Nieuwe Sultan*", dalam *Mataram*, Selasa, tanggal 8 Februari 1921, lembar ke 2. Pelantikan dilangsungkan di tiga tempat yang berdekatan, yaitu tratag Bangsal Kencono, Sitinggil, dan Bangsal Proboyakso di Kraton Yogyakarta. Hadir perwakilan dari Kesunanan Surakarta, yaitu Pangeran Hangabehi, saudara Sunan PB X, dan wakil dari Puri Mangkunegaran, yaitu Pangeran Prangwedono.

²⁵⁴ "*De Rondgang Des Sultans* ", dalam *Mataram*, Kamis, tanggal 10 Februari 1921. Kemeriahan arak-arakan ini digambarkan sangat meriah. Jalan-jalan dipenuhi manusia yang ingin menonton rajanya yang baru.

VIII, sebutannya adalah Sultan Sepuh. Hal ini merupakan pengulangan dengan peristiwa Sultan HB II yang bergelar Sultan Sepuh.²⁵⁵ Namun konteksnya berbeda mengingat Sultan HB II tetap tinggal di dalam kraton dan berdampingan dengan putranya (Sultan HB III) atau cucunya (Sultan HB V).

Meskipun tidak lagi tinggal di kraton, hubungan antara Sultan HB VII dan Sultan HB VIII tetap dekat. Sultan HB VIII kadang-kadang masih meminta nasehat kepada ayahnya, terutama bila menghadapi persoalan-persoalan pemerintahan yang dianggap penting – seperti persoalan campur tangan pemerintah kolonial dalam kehidupan keluarga raja di kraton Yogyakarta. Beberapa bulan setelah duduk di atas tahta, Sultan HB VIII mengangkat beberapa orang adiknya, dari Raden menjadi Pangeran. Sesuai dengan *Verklaring* yang ditandatanganinya, pemerintah kolonial mendapatkan peluang untuk ikut melakukan intervensi dalam urusan kraton – termasuk masalah pengangkatan sebagai pangeran harus dimintakan izin pemerintah. Dasar pertimbangan pemerintah kolonial adalah bahwa sesuai dengan reorganisasi agraria, mereka menerima gaji tetap – sebagai ganti atas penghapusan sistem apanage. Gaji mereka dibayar dari kas daerah (*landschapkas*) yang telah dibentuk. Dengan demikian, residen berhak untuk ikut menentukan pengangkatan bangsawan sesuai anggaran yang disediakan.²⁵⁶

Persoalan tersebut menimbulkan ketegangan antara Sultan HB VIII dan Residen Jonquiere. Sultan HB VII mendukung keinginan Sultan HB VIII, karena berdasarkan aturan adat dan tradisi keraton, semua adik kandung raja layak mendapatkan gelar pangeran. Sebaliknya Jonquiere yang bertolak pada prinsip penghematan anggaran menyampaikan persoalan ini kepada Dirk Fock, Gubernur Jenderal yang baru. Fock yang juga bertumpu pada prinsip pengetatan pengeluaran dan peningkatan pemasukan sebagai akibat dari kesulitan ekonomi pasca perang bagi Hindia Belanda, mengeluarkan keputusan yang meminta raja

²⁵⁵ Marihandono, Djoko dan Harto Juwono, *op.cit.*

²⁵⁶ ANRI, *Agenda 27 Juli 1921 nomor 773*, bundel *Algemeen Secretarie*. Pada kesempatan ini Sultan HB VIII berniat mengangkat empat orang adiknya yang telah dewasa dengan gelar Pangeran. Mengingat dalam aturan birokrasi yang baru Pangeran harus mendapatkan jabatan, hal ini jelas menambah beban anggaran bagi *landschapkas* Yogyakarta dan berakibat pada defisit.

agar membatasi jumlah pangeran yang ada. Peraturan ini diberlakukan di Kesunanan Surakarta maupun Kesultanan Yogyakarta.²⁵⁷

Selama berada di Ambarukmo, kondisi kesehatan Sultan HB VII terus memburuk. Hal ini disebabkan oleh penyakit asma yang dideritanya. Setelah beberapa kali pengobatan oleh dokter - baik yang disediakan pemerintah Belanda maupun yang dikirim oleh Sultan HB VIII - penyakitnya tetap parah. Hal ini diperburuk oleh kondisi usianya yang mendekati 82 tahun. Menjelang akhir Desember 1921, Sultan HB VII tidak lagi bisa meninggalkan tempat tidur dan puncaknya pada tanggal 28 Desember 1921 malam, ketika penyakit asmanya menyerang dengan hebat. Salah satu dari empat belas putranya yang tinggal bersamanya, bergegas mengirim kabar ke kraton. Sultan HB VIII yang menerima kabar itu segera datang ke Ambarukmo dan menunggu di samping ayahnya hingga larut malam.²⁵⁸

Malam itu, karena kondisi Sultan HB VII sempat membaik, maka Sultan HB VIII meninggalkan Ambarukmo dan kembali ke kraton. Namun keesokan harinya, pada pukul 12 siang, menyusul khabar baru bahwa Sultan HB VII kembali mengalami serangan asma. Sultan HB VIII kembali menengok ayahnya pada pukul 3 sore, tetapi kesadaran Sultan HB VII sudah mulai menurun. Bahkan ia sudah tidak lagi mengenal siapapun, dan pada pukul 6 sore tidak sadarkan diri. Pada pukul 9 malam, tanggal 29 Desember 1921, Sultan HB VII meninggal dunia.²⁵⁹ Sultan HB VIII memerintahkan agar jenazah Sultan HB VII dimasukkan ke dalam peti dan kemudian di bawa ke kraton malam itu juga – jenazah diberangkatkan ke kraton pada pukul 10 malam.

Di kraton, jenazah Sultan HB VII disemayamkan di Bangsal Probosuyoso. Pada pukul 12 tengah malam, upacara mendoakan jenazah secara Islam selesai.

²⁵⁷ANRI, *Agenda 8 November 1921 nomor 1202*, bundel *Algemeen Secretarie*. Namun terutama Kesultanan Yogyakarta merupakan pihak yang paling merasakan dampaknya dari peraturan pembatasan jumlah pangeran ini, karena Sunan PB X sudah menempatkan semua saudaranya menjadi pangeran pada akhir abad XIX.

²⁵⁸“Keadaannya Sultan Sepoeh”, dalam *Sin Po* tanggal 29 Desember 1921. Kedatangan dan sikap Sultan HB VIII ke Ambarukmo membuktikan bahwa hubungan ayah dan anak tersebut tetap baik. Setidaknya Sultan HB VIII masih menunjukkan penghormatan dan kasihnya kepada orangtuanya yang tidak lagi menjabat sebagai penguasa.

²⁵⁹“Sultan Sepoeh”, dalam *Sin Po*, tanggal 30 Desember 1921.

Para tamu kemudian mulai hadir, seperti Pangeran Prangwedono dari Mangkunegaran, sedangkan Sunan PB X diwakili oleh putranya, Pangeran Kusumodiningrat.²⁶⁰ Pada tanggal 1 Januari 1922, hari Sabtu pukul 10.20, jenazah raja ini diberangkatkan menuju Makam Imogiri. Jalur keberangkatannya disesuaikan seperti jenazah seorang raja yang masih memerintah yaitu melewati Alun-alun Kidul dan Gapura Gading, untuk seterusnya menuju pemakaman Imogiri.²⁶¹

Setelah Sultan HB VII meninggal, persoalan baru muncul di kraton Yogyakarta. Masalah itu menyangkut peninggalan Sultan HB VII - terutama status aset yang ditempatinya, seperti Pesanggrahan Ambarukmo. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Residen Jonquiere sepengetahuan Sultan HB VIII, harta kekayaan Sultan HB VII di Ambarukmo mencapai 900 ribu gulden. Kekayaan ini terdiri atas 500 ribu gulden dalam bentuk uang tunai dan sisanya adalah emas dan permata.²⁶²

Tampaknya, semua kekayaan ini kemudian diambil dan dibawa ke kraton. Hal ini terbukti dengan adanya protes - dan sekaligus - permohonan dari kerabat yang ditinggalkan, kepada Sultan HB VIII, agar memperhatikan kehidupan mereka. Meskipun mereka tetap diizinkan tinggal di Ambarukmo, kebutuhan hidup mereka tidak dijamin dan tidak dipenuhi oleh pihak kraton. Dasar pertimbangannya, bahwa mereka tidak lagi menjadi bagian dari kraton, setelah tinggal di luar lingkungan kraton. Menyikapi hal ini, pada pertengahan Januari 1922, salah satu putra Sultan HB VII, Pangeran Subronto meminta kepada Residen Jonquiere agar bersedia mendesak Sultan HB VIII untuk memperhatikan kehidupan ibu suri Ratu Kencono dan kerabat lainnya.²⁶³

²⁶⁰ Ada berita lain yang menyebutkan bahwa bukan Kusumodiningrat melainkan Pangeran Kusumoyudo, Putra Sunan PB X, yang tiba bersama Pangeran Cakraningrat, Pangeran Notoprojo dan Pangeran Cokronegoro. Kemudian juga hadir Pangeran Parabuningrat dan Pangeran Hadiwijoyo, semuanya mewakili Sunan Solo. Lihat Anon, "Hamangkoe Boewono VII", dalam *Nederlandsch Indië Oud en Nieuw*, tahun 1922-1923, halaman 91.

²⁶¹ "Wafatnja Sultan ka VII", dalam *Sin Po*, tanggal 2 Januari 1922.

²⁶² "Hartanja Bekas Sultan Djokja", dalam *Sin Po* tanggal 3 Januari 1922.

²⁶³ ANRI, *Zendbrief 16 Januari 1922 no. 1662*, bundel *Algemeen Secretarie*.

Pada hari yang sama, ketika Jonquiere menerima Subronto dengan permohonannya, putra Sultan HB VII dari Ratu Kencono yang lain yaitu Pangeran Aryo Suryo Subanto menghadap Residen Jonquiere dengan permohonan serupa bagi kepentingan dirinya dan keluarganya. Bahkan dalam pembicaraan itu, Subronto dan Subanto meminta Jonquiere tentang kemungkinan membawa Ratu Kencono untuk kembali tinggal di kraton.²⁶⁴

Jonquiere menyampaikan kedua permohonan ini kepada Sultan HB VIII di kraton dua hari kemudian. Namun hingga Residen Jonquiere diganti, persoalan ini tetap mengambang – belum ada jawaban pasti dari pihak kraton. Pada kesempatan menghadap Sultan HB VIII itu, selain menyampaikan permohonan dua pangeran dan kerabat Ratu Kencono, Jonquiere juga menyampaikan telegram dari Gubernur Jenderal Fock yang berisi pernyataan bela-sungkawa atas wafatnya Sultan HB VII. Telegram itu kemudian diserahkan oleh Jonquiere kepada Sultan HB VIII dan kerabat Kesultanan Yogyakarta.²⁶⁵ Dokumen ini secara resmi menandai, bahwa semua persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara Sultan HB VII dengan pemerintah kolonial Belanda telah berakhir. Dan sejak itu, pemerintah kolonial Belanda menghadapi seorang raja baru dengan karakter kepemimpinannya yang berbeda dengan raja sebelumnya di Kesultanan Yogyakarta.²⁶⁶

²⁶⁴ANRI, *Zendbrief 16 Januari 1922 nomor 1664*, bundel *Algemeen Secretarie*.

²⁶⁵ANRI, *Besluit 18 Januari 1922 nomor 21*, bundel *Algemeen Secretarie*.

²⁶⁶ANRI, *Zendbrief 30 Maret 1922 nomor 12513*, bundel *Algemeen Secretarie*